

ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOGOR

Ade Budi Setiawan¹, Indra Cahya Kusuma², Harma Yesti³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor

Email: ade.budi.setiawan.akt@unida.ac.id¹, indra.cahya.k@unida.ac.id²,

harma.yesti2020@unida.ac.id³

Abstract

The purpose of this study is to calculate the Increase in Regional Original Income (PAD) of Bogor Regency. Types of local taxes on average The highest contribution to BPHTB Tax with an average of 36.66% and the lowest Contribution from Parking Tax with an average of 0.44% in the 2018 - 2021 observations and the average growth of each type of local tax in the year of observation The highest 2018-2021 is BPHTB Tax with an average of 18.21% and the lowest Growth Entertainment Tax with an average of (-10.02).

Keywords: Local Original Tax, Local Tax, Collection Ratio, Classification of Types of Local Taxes.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menghitung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Jenis pajak daerah rata-rata Kontribusi yang tertinggi pada Pajak BPHTB dengan rata-rata 36.66% serta Kontribusi dari Pajak Parkir terendah dengan rata-rata 0,44% pada pengamatan tahun 2018 - 2021 dan Pertumbuhan rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan 2018- 2021 yang tertinggi yaitu Pajak BPHTB dengan rata-rata 18,21% serta Pajak Hiburan Pertumbuhan terendah dengan rata-rata (-10,02).

Kata Kunci: Pajak Asli Daerah, Pajak Daerah, Collection Ratio, Klasifikasi Jenis Pajak Daerah

Corresponding Author; Harma Yesti
E-mail: harma.yesti2020@unida.ac.id



PENDAHULUAN

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat serta kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Meningkatkan keleluasaan dan akuntabilitas dalam pembelanjaan APBD- nya, penerimaan harus bersumber dari daerah yang potensial serta menggali secara maksimal dalam peraturan koridor perundang- undangan yang saat ini berlaku, termasuk diantaranya yaitu Pajak daerah .

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Target
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	103,00	321.924.387.638
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73	387.088.628.401
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11	347.533.590.731
2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	112,67	417.095.113.015

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor, 2022

Dapat terlihat dari Tabel diatas selama periode 4 tahun anggaran Kabupaten Bogor realisasi penerimaan (PAD) cenderung meningkat. Pada tahun 2018 - 2019 penerimaan PAD pada pajak daerah cukup tinggi yaitu Rp. 2.797.460.113.638 dan Rp. 3.150.980.489.687,00. Pada tahun 2020 total PAD di Kabupaten Bogor terjadi penurunan yaitu sebesar Rp.2.810.155.352.282,00 dikarenakan situasi Pandemi Covid -19. Pada BAPPENDA Kabupaten Bogor total pendapatan Kabupaten Bogor pada 2021 senilai Rp8,73 triliun. Adapun PAD Kabupaten Bogor menjadi tolak ukur pembangunan suatu daerah dengan sumbangan sejumlah Rp3,29 triliun atau 41% dari total pendapatan 2021, jumlah dana perimbangan diterima daerah senilai Rp2,98 triliun atau sebesar 36% pada tahun tersebut.. Komponen lain- lain pendapatan yang sah berkontribusi yang paling rendah. pemasukan pajak daerah telah mencapai Rp2,4 triliun pada 2021 atau sebesar 72% dari total jumlah Pajak Asli Daerah. Selanjutnya, Lain-lain PAD yang sah memberikan sumbangan sebesar 23% atau sejumlah 773 miliar. Di perinci PAD Kabupaten Bogor lebih dominan oleh realisasi pajak daerah. Pemasukan pajak daerah mencapai Rp. triliun pada tahun 2021 atau sebesar 72% dari total PAD. Penerimaan retribusi daerah merupakan Kontribusi terendah PAD Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Studi kasus yaitu suatu penelitian terhadap objek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan di BAPPENDA Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman No. 1 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

DESAIN PENELITIAN

Data Kuantitatif, yaitu data yang umumnya dominan diisi oleh angka atau bilangan sehingga dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik teori komperatif perhitungan matematika atau statistika.

JENIS SUMBER DATA

Jenis Data kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena subjek yang diteliti, melalui deskripsi berupa katakata dan bahasa dalam konteks tertentu. untuk dipahami. secara alami dan melalui penggunaan berbagai cara alami (Moloeong, 2011). Sumber Data Arikunto (2006:107) data sumber penelitian yaitu subjek dari data yang digunakan, yaitu:

- a. Data Primer Melalui wawancara secara langsung.
- b. Data Sekunder Data sekunder melalui arsip laporan keuangan 2016-2020.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian Terdahulu (Previous Research) yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur – literatur .

1. Untuk memperoleh data melalui Penelitian lapangan (Field Research) maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor BAPPENDA Kabupaten Bogor dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Observasi (Observation)
 - b. Dokumentasi (Documentation)

Wawancara

Metode Analisis Data

Metode analisa menggunakan analisis horizontal, dengan adanya perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode yang lain (Kasmir 2012:69)

a. Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak asli daerah}}{\text{Target penerimaan pajak asli daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi=

$$\frac{\text{Biaya dikeluarkan memungut pajak daerah}}{\text{Target Realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Kontribusi $wXi = \frac{Xi}{X} \times 100\%$

X

Dimana :

wXi = Kontribusi pajak daerah jenis i Xi = Jumlah pajak daerah jenis i

X = Total pajak daerah

d. Rasio Laju Pertumbuhan $g = \frac{Xi(t) - Xi(t-1)}{Xi(t-1)} \times 100\%$

$Xi(t-1)$

Dimana :

gXi = Pertumbuhan pajak daerah jenis i $Xi(t)$ = Jumlah jenis pajak daerah tahun ke t $Xi(t-1)$

= Jenis pajak daerah tahun ke t-1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah. Fokus pengambilan data. Dalam hal ini yang digunakan yaitu pengumpulan dan pengolahan data sekunder yaitu data yang didapatkan langsung dari turun lapangan dan wawancara berupa dokumen yang diberikan oleh BAPPENDA Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan dan data pendukung lainnya dari Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak.

Tabel 4.2.9
Rekapitulasi penerimaan PAD tahun 2018 – 2021

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi	Hasil Kekayaan yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan yang sah	Total PAD
2018	1.969.427.530.834	112.792.280.192	44.287.173.198	670.953.129.414	2.797.460.113.638
2019	2.232.991.424.401	140.790.695.891	57.537.749.304	719.660.620.091	3.150.980.489.687
2020	1.857.411.776.716	128.914.969.533	67.102.677.276	756.725.928.757	2.810.155.352.282
2021	2.462.339.432.505	115.545.927.200	71.303.513.920	1.059.228.927.24	3.708.417.800.872

7

Sumber : Data diolah

Dapat terlihat dari Tabel diatas bahwa selama periode 4 tahun anggaran Kabupaten Bogor penerimaan realisasi PAD cenderung meningkat. Pada tahun 2018 - 2019 pada pajak daerah cukup tinggi itu dilihat dari total jumlah PAD Kabupaten Bogor sebesar Rp. 2.797.460.113.638 dan Rp. 3.150.980.489.687,00. Pada tahun 2020 total Penerimaan PAD terjadi penurunan yaitu sebesar Rp. 2.810.155.352.282,00 dikarenakan bencana Pandemi Covid - 19. Pada Tahun 2021 penerimaan PAD Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar sebesar Rp. 3.708.417.800.972,10.

Analisis Penerimaan Pajak daerah (PD) di Kabupaten Bogor

ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOGOR

Setiawan¹, Kusuma², Harma Yesti³

pajak daerah merupakan salah satu potensi dalam meningkatkan penerimaan. PAD Kabupaten Bogor sangat berpengaruh karena dalam setiap tahun PAD berbeda apalagi dengan adanya situasi pandemic Covid 19 sekarang. Pencapaian ini menunjukkan pengumpulan pajak daerah dilakukan secara efektif. Hal ini berarti dalam pengumpulan penerimaan PD Kabupaten Bogor melebihi dari target yang di tentukan dalam perencanaan anggaran terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 4.2.2 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2018 – 2021 (dalam %)

	Jenis Pajak Daerah	Tahun (%)				Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	
1	Pajak Hotel	118,02	130,87	133,11	128,11	3,87
2	Pajak	118,88	119,96	127,46	120,06	7,14
3	Pajak Hiburan	113,46	107,10	112,99	142,77	2,49
4	Pajak	109,55	111,78	128,76	128,48	0,93
	Pajak					
5	Penerangan Jalan	107,38	103,75	102,82	106,28	13,06
6	Pajak Parkir	105,14	101,96	128,71	115,18	0,44

Sumber: Data diolah

Dapat terlihat dari Tabel diatas bahwa pajak BPHTB memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah sebesar 129,65%. Jenis pajak daerah (PD) di Kabupaten Bogor berdasarkan rata- rata selama empat tahun pengamatan yaitu pada periode tahun 2018 - 2021 terhadap jenis pajak yang secara berturut-turut memberikan peran penting atau kontribusi dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil terhadap total PAD Kabupaten Bogor.

Analisis Efektivitas Pajak Daerah (PD) Kabupaten Bogor

Efektivitas penerimaan PD Kabupaten Bogor dari Tahun 2018-2021 di analisis dengan menggunakan rasio efektivitas dengan rumus diatas dan disajikan dalam perhitungan sebagai berikut :

a. 2018

$$EPD = \frac{2.797.460.113.638}{2.475.535.726.000} \times 100 = 113,00\%$$

b. 2019

$$EPD = \frac{3.150.980.489.687}{2.700.000.000.000} \times 100 = 117,73\%$$

2.676.364.947.000

c. Tahun 2020

$$\text{EPD} = \frac{2.810.155.352.282}{2.462.621.761.551} \times 100 = 114,10\%$$

d. Tahun 2021

$$\text{EPD} = \frac{3.706.417.800.972}{3.291.322.687.957} \times 100 = 112,67\%$$

Perhitungan collection ratio dengan melihat perbedaan realisasi dan target PD di Kabupaten Bogor, dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.3. tingkat efektivitas pajak daerah (dalam persen)

Tahun	Total Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	113,00%	Sangat Efektif
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73%	Sangat Efektif
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,10%	Sangat Efektif
2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	112,67%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah

Perhitungan efektivitas pajak pada 4tahun terkahir (periode 2018 – 2021)telah mencapai melebihi besar dari 100%, bahkan ada yang mencapai 117%. Terbukti bahwa PD Kabupaten Bogor selalu mengalami peningkatan tiaptahunnya sehingga Selalu efektif meningkatkan PAD dihitung dari rasio efektivitas. Terget penerimaan pajak tertinggi di tahun 2021 yaitu senilai Rp 3.291.322.687.957 dengan realisasi pencapaian 112,67% dan dari segi realisasi penerimaan pajak yang tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu dengan nilai realisasi 117,73%

Analisis Efisiensi Pajak di KabupatenBogor

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi pajak daerah dengan melihat perbandingan realisasi dan biaya pemungutan PD Kabupaten Bogor:

Tabel 4.2.4 Efisiensi Pajak Kabupaten Bogor

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi PAD	Efisiensi
2018	143.052.097.000	2.797.460.113.638	5,11
2019	156.384.126.000	3.150.980.489.687	4,96
2020	141.067.869.000	2.810.155.352.282	5,02
2021	173.082.299.471	3.708.417.800.972	4,67

Sumber: Data diolah

ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOGOR

Setiawan¹, Kusuma², Harma Yesti³

Tingkat efisiensi pemungutan PD Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan di tahun 2021 yang diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak.

Kabupaten Bogor telah berusaha semaksimal mungkin untuk pemungutan pajak daerah dengan menekan biaya.

Analisis Laju Pertumbuhan (PD) di kabupaten Bogor

yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak daerah dari tahun ke tahun. Keseluruhan selama periode 2018- 2021 pemungutan pajak daerah dapat dikategorikan cukup efisien karena tidak ada yang melebihi dari 100%.

Perhitungan *collection ratio* dengan melihat realisasi dan target pajak daerah (PD) Kabupaten Bogor lalu membandingkan dari hal tersebut.

Tingkat pengumpulan pajak daerah (2018- 2021) kecuali pajak hiburan yang selalu mengalami penurunan dikarenakan objek wisata di Kabupaten Bogor tutup selama pandemi Covid 19 dan atau menerima kunjungan wisatawan dibatasi sekitar 25% saja, sehingga realisasi penerimaan pajak nya relatif sangat kecil. Hasil perhitungan *collection ratio* dengan melihat Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan dan peningkatan periode 2018 – 2021, perbandingan target dan realisasi PD di Kabupaten Bogor yang terdiri dari pajak penerangan, Pajak reklame, Pajak restoran, jalan, Pajak hiburan Pajak hotel, pajak pengambilan bahan galian c/MBLB, pajak parkir, pajak air tanah, PBB P2 dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)

Tabel 4.2.5 Rata-rata Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bogor Tahun 2018-2021

REKAPITULASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018 - 2021						
NO	URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA
1	Pajak Daerah					
a.	Pajak Hotel	81.532.621.496,75	101.343.325.328,00	63.149.157.520	84.046.897.021	82.518.000.341,44
b.	Pajak Restoran	141.620.512.271,40	172.760.080.868,00	124.362.590.156	171.173.523.202	152.479.176.624,35
c.	Pajak Hiburan	76.625.640.783,00	73.242.869.940,00	31.633.602.318	26.858.799.965	52.090.228.251,50
d.	Pajak Reklame	19.885.655.282,00	21.150.539.047,00	17.640.140.439	19.642.975.050	82.518.000.341,44
e.	Pajak Penerangan Jalan	268.076.445.866,00	272.360.099.857,00	272.443.345.205	289.819.857.526	275.674.937.113,50
f.	Pajak Parkir	10.744.054.629,00	11.058.135.573,00	6.623.826.077	8.882.004.068	9.327.005.086,75
g.	Pajak Air Tanah	63.221.750.458,10	66.619.918.381,00	62.742.740.431	76.222.263.824	67.201.668.273,53
h.	BPHTB	657.280.259.278,00	805.441.134.043,00	632.023.140.926	1.063.165.406.371	789.477.485.154,50
i.	MBLB	140.764.227.192,00	136.743.777.477,00	120.725.032.825	123.152.589.526	130.346.406.755,00
j.	PBB P2	509.676.363.578,00	572.271.543.887,00	526.068.200.819	599.375.115.952	452.559.498.237,50

Sumber: Data diolah

Untuk mendapat identifikasi dari tahun anggaran 2018 s/d tahun anggaran 2021. Berdasarkan perhitungan terhadap setiap jenis pajak daerah dapat diidentifikasi melalui klasifikasi dengan melakukan perhitungan klasifikasi berbagai macam terhadap PD maka digunakan rumus martik berdasarkan alat analisis overlay.

Tabel 4.2.6. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah (PD) di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021

No	Jenis Pajak Daerah 2018	Kontribusi Kontribusi %	Kontribusi 2019 %	Kontribusi 2020 %	Kontribusi 2021 %	Rata- Rata	Urutan
1	Pajak Hotel	4,14	4,54	3,40	3,41	3,87	6
2	Pajak Restoran	7,19	7,74	6,70	6,95	7,14	4
3	Pajak Hiburan	3,89	3,28	1,70	1,09	2,49	8
4	Pajak Reklame	1,01	0,95	0,95	0,80	0,93	9
5	Pajak Penerangan Jalan	13,61	12,20	14,67	11,77	13,06	3
6	Pajak Parkir	0,55	0,50	0,36	0,36	0,44	10
7	Pajak Air	3,21	2,98	3,38	3,10	3,17	7
8	BPHTB	33,37	36,07	34,03	43,18	36,66	1
9	MBLB	7,15	6,12	6,50	5,00	6,19	5
10	PBB P2	25,88	25,63	28,32	24,34	26,04	2

Sumber: Data diolah

Tabel 4.2.7. Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah (PD) di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021

	Jenis Pajak Daerah	Pertumbuhan %	Pertumbuhan 2019 %	Pertumbuhan 2020 %	Pertumbuhan 2021 %	Rata- Rata	Urutan
1	Pajak Hotel	19,99	24,30	(37,69)	33,09	9,92	3
2	Pajak Restoran	28,68	21,99	(28,01)	37,64	15,07	2
3	Pajak Hiburan	36,22	(4,41)	(56,81)	(5,09)	(10,02)	10
4	Pajak Reklame	1,47	6,36	(16,60)	11,35	0,65	9
5	Pajak Penerangan Jalan	8,51	1,60	0,03	6,38	4,13	6
6	Pajak Parkir	10,35	2,92	(40,10)	34,09	1,82	7
7	Pajak Air Tanah	11,30	5,37	(5,82)	21,48	8,08	4
8	BPHTB	3,60	22,54	(21,53)	68,22	18,21	1
9	MBLB	16,05	(2,86)	(11,71)	2,01	0,87	8
10	PBB P2	10,10	12,28	8,07	13,93	7,06	5

Sumber: Data diolah

Terlihat dari tabel diatas bahwa selama periode 2018-2021 terlihat pertumbuhan dan kontribusi setiap tahun meningkat terkecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan yang dikarenakan faktor situasi pandemi covid 19 akan tetapi di tahun 2021 kontribusi dan pertumbuhan kembali meningkat hanya saja pajak hiburan yang pertumbuhannya masih sangat sedikit.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Analisis penerimaan PD di Kabupaten Bogor setiap tahunnya yaitu sekitar 2,4 Triliun hingga 3,2 Triliun, hal tersebut bisa saja bertambah seiring dengan bertambah nya pembangunan dari segi infrastruktur maupun lainnya di tiap daerah di Kabupaten Bogor. 1. Ektivita PD di Kabupaten Bogor dikategorikan efektif. Karena efektivitas PD di Kabupaten Bogor dari tahun 2018- 2021 adalah 113%, 117%, 114% dan 112%. 2. Jadi rata-rata efektivitas PD di Kabupaten selalu melebihi target sehingga dikategorikan sangat efektif. Tingkat efektivitas PD yang terendah berada pada tahun 2021 yaitu 112% dan yang tertinggi di tahun 2019 yaitu 117%. 3. Efisiensi PD Kabupaten Bogor terjadi penurunan pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Efisiensi pada tahun 2021 senilai 4. bahwa Kabupaten Bogor berhasil dalam mewujudkan tingkat efisien pemungutan pajak. Laju Pertumbuhan penerimaan PD di Kabupaten Bogor sering mengalami pasang surut karena efek pandemi covid 19 namun walau begitu efektivitas pendapatan selalu sangat efektif dan melebihi target yang direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2015. **Undang- Undang KUP No. 42 Tahun 2008**. Jakarta Pusat.
- Santoso, Singgih. 2001. **SPSS(Statistical Product And ServiceSolution)**. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Agung, Mulyo. 2014. **PerpajakanIndonesia**.
- Lentera IlmuCendekia.
- Ahmad Yani, 2009, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Pers.
- Adriani .2014. **Teori Perpajakan**, Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar Sanusi, 2011, **Metode Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta.
- Berliana. **Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya**. Program Studi :Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya 2015
Ikatan Akuntan Indonesia. 2016.
- Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan**. Jakarta:
IkatanAkuntan Indonesia
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan Edisi Revisi 2009**. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan Edisi Revisi**.Yogyakarta. ANDI.
- Murniati S, 2017. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi
- Sari, Diana. 2013. **Konsep Dasar Perpajakan**.
- Bandung. PTRefikaAdimata Mardiasmo. 2016. **Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi**.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.**
- Lumikis, 2015. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PeningkatanPendapatan Asli Daerah diseluruh Kabupaten/ Kota Maluku Utara Provinsi Maluku.*Jurnal Emba*
- terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *JurnalKompetitif***
- Ghozali, Imam, 2013,Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.**
- Resmi, Siti. 2012. Perpajakan teori dan Kasus.Jakarta. SalembaEmpat.M**
- Republik Indonesia. 2015. Undang- Undang KUP No. 16 Tahun 2009. Jakarta Pusat**
- Suandy, Erly. 2009. **Hukum Pajak**. Jakarta.Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabet.
- Sunarto. 2005. **Pajak dan Retribusi Daerah**.Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.
- Soemitro, Rochmat **Perpajakan, EdisiRevisi 2013**. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang Undang nomor 11 Tahun 2016 **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP)**.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. **Tentang Pemerintahan daerah, pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**